

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN BERBASIS
AKRUAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
(Studi Kasus Pada Unit Kerja Mahkamah Agung di Wilayah
Lampung)**

(Tesis)

Oleh

Nidya Alyssa Astari



**PROGRAM PASCASARJANA ILMU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN BERBASIS
AKRUAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
(Studi Kasus Pada Unit Kerja Mahkamah Agung di Wilayah
Lampung)**

Oleh

Nidya Alyssa Astari

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU AKUNTANSI
pada

**Program Pascasarjana Ilmu Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM PASCASARJANA ILMU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN BERBASIS AKRUAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Kasus Pada Unit Kerja Mahkamah Agung di Wilayah Lampung)

Oleh

Nidya Alyssa Astari

Organisasi sektor publik telah terlibat dalam strategi perubahan dalam rangka memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat akan akuntabilitas keuangan. Perubahan tersebut menjadikan sistem manajemen sektor publik yang awalnya terkesan birokratis menjadi manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi kepentingan publik. Penelitian Ini bertujuan untuk Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, dan sistem akuntansi pemerintah keuangan berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pada unit satuan kerja mahkamah agung wilayah lampung.

Variabel dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan sebagai variabel dependen dan kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan berbasis akrual sebagai variabel independen. Data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari kuisioner yang disebar pada sampel yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung. Sampel penelitian ini adalah operator Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) dan operator Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) pada unit kerja Mahkamah Agung di wilayah Lampung yang berjumlah 44 orang.

Hipotesis dari penelitian ini diuji dengan model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemodelan persamaan struktural (*Structural Equation Modeling*) yang berbasis komponen atau varian (*component based*) yaitu *Partial Least Square* (PLS). Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia mempunyai pengaruh yang signifikan positif

terhadap kualitas laporan keuangan, dan variabel penerapan standar akuntansi keuangan berbasis akrual mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Kata kunci : Kualitas Laporan Keuangan, Kompetensi Sumber Daya Manusia,
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Berbasis Akrual dan *Partial*
Least Square

ABSTRACT

THE EFFECT OF HUMAN RESOURCE COMPETENCY AND IMPLEMENTATION OF ACCRUAL BASIS OF FINANCIAL ACCOUNTING SYSTEM ON QUALITY OF FINANCIAL STATEMENTS

(Case Study of Supreme Court in Lampung Region)

By

Nidya Alyssa Astari

Organizations public sector have been involved in change strategies for financial accountability. Makes change the public sector management bureaucratic system to a flexible public sector management and better accommodates the public interest. This research the influence of human resource competence, and accounting system of financial based on the accrual to quality of financial statements on supreme court in lampung region.

Variables in this research are the quality of financial statements as the dependent variable and competence of human resources and the implementation of accrual basis financial accounting system as an independent variable. The data used are primary data sourced from questionnaires distributed on samples obtained and collected directly. The sample of this research is the operators of Sistem Akuntansi Instansi berbasis Akrual (SAIBA) and operators of Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) at the Supreme Court in Lampung region which amounted to 44 respondents.

The hypothesis of this research used the model of analysis is structural equation modeling based on component or variant (component based) that is Partial Least Square (PLS). The result of this research concludes that the competency variable of human resources has a significant positive influence on the quality of financial statements, and the variable of application of accrual basis of financial accounting standard has a significant positive influence on the quality of financial statements.

Keywords : Quality of Financial Statement, Human Resources Competence, Application of Accrual Based Financial Accounting System and Partial Least Square

Judul Tesis : PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA
MANUSIA, DAN PENERAPAN SISTEM
AKUNTANSI KEUANGAN BERBASIS AKRUAL
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
(Studi Kasus Pada Unit Kerja Mahkamah Agung di
Wilayah Lampung)

Nama Mahasiswa : Nidya Alyssa Astari

Nomor Pokok Mahasiswa : 1421031014

Program Studi : Magister Ilmu Akuntansi

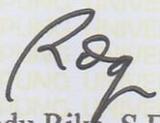
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



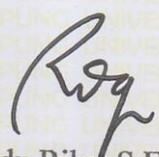
Pembimbing I

Pembimbing II


Susi Sarumpaet, SE., MBA. Ph.D., Akt
NIP. 19691008 199512 2 001


Dr. Rindu Rika, S.E., M.Si.
NIP 19750620 200012 2 001

Ketua Program Magister Ilmu Akuntansi


Dr. Rindu Rika, S.E., M.Si.
NIP 19750620 200012 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Susi Sarumpaet, SE., MBA. Ph.D.,Akt

Sekretaris : Dr. Rindu Rika, S.E., M.Si

Penguji Utama : Dr. Agrianti Komalasari, SE., M.Si., Akt

Sekretaris Penguji : Dr. Ribhan SE., M.Si.

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, SE., M.Si.
NIP. 19610904 198703 1 011

3. Direktur Program Pascasarjana



Prof. Drs. Mustofa, M.A., Ph.D.
NIP. 19570101 198403 1 020

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 15 Januari 2018

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul **"Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Berbasis AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Unit Kerja Mahkamah Agung di Wilayah Lampung) "** adalah karya Saya sendiri dan Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang di sebut *plagiatisme*;
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidak benaran, maka Saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang akan diberikan dan bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandarlampung, 25 Januari 2018

Pembuat Pernyataan,



Nidya Alyssa Astari
NPM 1421031014

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandarlampung pada tanggal 27 Januari 1990 yang merupakan anak pertama dari empat bersaudara pasangan Hermansyah, S.E dan Dra. Rospardewi, M.M.

Pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak Persit Bandar Lampung, Pendidikan di Sekolah Dasar Kartika Jaya (II-5) Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2002, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri (SLTPN) 4 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2005, Sekolah Menengah Atas (SMA) Xaverius Pahoman yang diselesaikan pada tahun 2008 dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi negeri di Fakultas Ekonomi Universitas Lampung Jurusan Akuntansi yang diselesaikan pada tahun 2012.

Penulis bekerja di instansi pemerintah Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai penata laporan keuangan sejak tahun 2015.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ketulusan hati kupersembahkan karya kecil ini kepada :

Papa dan Mama tercinta

Suami Tercinta

Adik – Adik ku

Sahabat serta saudaraku

Almamaterku

dan Indonesiaku.....

MOTTO

“Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(**QS. Alam Nasyrh : 5**)

“Tidak ada namanya kegagalan dalam kehidupan selama kita menganggap semuanya bagian dari proses kehidupan”

(**Deddy Corbuzier**)

“Meskipun tidak ada yang bisa kembali dan memulai yang baru. Tapi siapa pun bisa memulai dari sekarang dan membuat akhir yang baru.”

(**Carl Bard**)

“ Tugas kita bukanlah untuk berhasil, karena tugas kita adalah untuk terus mencoba, sebab didalam mencoba itulah kita dapat menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil.”

(**Mario Teguh**)

SANWACANA

Puji syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, tesis ini dapat diselesaikan.

Tesis dengan judul *"Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Berbasis AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Unit Kerja Mahkamah Agung di Wilayah Lampung)"* adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains Akuntansi pada Program Pascasarjana Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;
2. Ibu Dr. Rindu Rika Gamayun, SE., M.Si., selaku Ketua Program Pascasarjana Ilmu Akuntansi Universitas Lampung sekaligus Sekretaris Penguji yang telah memberikan dukungan, saran, arahan dan waktunya selama penyusunan tesis.
3. Ibu Susi Sarumpaet, Ph.D.,Akt selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan dukungan, saran, dan waktunya selama penyusunan tesis.
4. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, SE., M.Si., Akt. selaku Penguji Utama yang telah memberikan dukungan, saran, dan waktunya selama penyusunan tesis.
5. Bapak Dr. Ribhan, S.E.,M.Si. selaku Sekretaris Penguji yang juga telah memberikan dukungan, saran, arahan dan waktunya selama penyusunan tesis.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat bermanfaat selama penulis berada di Pascasarjana Ilmu Akuntansi
7. Pengelola dan karyawan serta karyawan Pascasarjana Ilmu Akuntansi yang ikut membantu kelancaran perkuliahan.

8. Papa dan Mama tercinta, Serta Ibu Mertuaku yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil serta senantiasa mendoakanku dalam setiap zikir dan sujud-sujud malamnya.
9. Adik – adikku (Riza, Nanta, dan Dinda) yang telah memberikan semangat dan dukungan.
10. Suamiku Tercinta Andi Darma Putra, S.STP., MIP. terimakasih untuk inspirasi dan kebersamaannya, selalu membantu dalam proses bimbingan dan ujian .
11. Teman-teman angkatan 5 PIA (Niar, Sist Revi, Melati, Mba Devi, Mba Luke, Mba Lela, Umar, Jerry, Kak Bams, Kak Daniel, dan Kak Ade) terimakasih untuk suka duka dan kebersamaannya.
12. Bidadari Surga Squad (zakih, Kobo, Phika, Econg, Jupe) untuk semangat dan kebersamaannya.
13. Keluarga besar Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang telah memberikan izin dan kompensasinya selama perkuliahan berlangsung.
14. Rekan-rekan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang (Mba Sofei, Mba Eong, Mba Tikew, Mba Rinul, Bang Suhe, dan Eza) terima kasih untuk kebersamaannya.
15. Rekan-rekan lainnya yang ikut memberikan dukungannya selama penyusunan tesis ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih untuk bantuannya.

Semoga karya ini bermanfaat bagi seluruh pihak dan semoga Allah memberikan rahmat, hidayah dan ridho-Nya kepada kita semua.

Bandar Lampung, Februari 2018

Penulis,

Nidya Alyssa Astari

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR SINGKATAN	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 <i>Teori New Public Management</i>	9
2.1.2 Teori Kontijensi.....	11
2.1.3 Teori Keagenan.....	12
2.1.4 Kualitas Laporan Keuangan.....	13
2.1.5 Kompetensi Sumber Daya Manusia.....	19
2.1.6 Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis AkruaI	24
2.2 Review Penelitian Terdahulu.....	33
2.3 Pengembangan Hipotesis.....	37
2.3.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	37
2.3.2 Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	38
2.4 Desain Penelitian.....	41

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Sumber Data.....	42
3.2 Populasi dan Sampel.....	42
3.3 Definisi Operasional Variabel.....	44
3.4 Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	46
3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	46
3.4.2 Model Analisis.....	48

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Responden.....	54
4.1.1 Jenis Kelamin Responden.....	54
4.1.2 Usia Responden.....	55
4.1.3 Lamanya Bekerja Responden.....	55
4.1.4 Latar Belakang Pendidikan Responden.....	56
4.2 Analisis Statistik Deskriptif.....	57
4.2.1 Kompetensi Sumber Daya Manusia.....	59
4.2.2 Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrua.....	63
4.3 Analisis Data.....	69
4.3.1 Evaluasi Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>).....	69
4.3.1.1 Validitas Konvergen.....	70
4.3.1.2 Validitas Diskriminan.....	71
4.3.1.3 Composite Reliability.....	73
4.3.2 Evaluasi Model Struktural (<i>Inner Model</i>).....	75
4.3.3 Pembahasan.....	78

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan.....	82
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	83
5.3 Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR SINGKATAN

BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
CALK	: Catatan Atas Laporan Keuangan
FASB	: <i>Financial Accounting Standard Board</i>
IAI	: Ikatan Akuntan Indonesia
LKKL	: Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
MA	: Mahkamah Agung
SAI	: Sistem Akuntansi Instansi
SAIBA	: Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintah
SFAC	: <i>Statement of Financial Accounting Concepts</i>
SEM	: <i>Structural Equation Model</i>
SIMAK-BMN	: Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara
PLS	: <i>Partial Least Square</i>
PP	: Peraturan Pemerintahan
PSAP	: Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
TW	: Tidak Wajar
TMP	: Tidak Memberikan Pendapat
WDP	: Wajar Dengan Pengecualian
WTP	: Wajar Tanpa Pengecualian

DAFTAR TABEL

TABEL	Halaman
Tabel 1.1 Opini Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2011-2015.....	4
Tabel 2.1 Review Penelitian Terdahulu.....	33
Tabel 3.1 Data Sampel Penelitian.....	43
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel.....	44
Tabel 3.3 Kriteria Penilaian PLS.....	53
Tabel 4.1 Data Jenis Kelamin Responden Operator SAIBA dan SIMAK.....	55
Tabel 4.2 Data Usia Responden.....	56
Tabel 4.3 Data Lama Bekerja Responden.....	57
Tabel 4.4 Latar Belakang Pendidikan Responden.....	58
Tabel 4.5 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia Dimensi Pengetahuan (Knowledge).....	60
Tabel 4.6 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia Dimensi Keahlian (Skill)	61
Tabel 4.7 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia Dimensi Perilaku (Attitude).....	62
Tabel 4.8 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia Dimensi Latar Belakang Pendidikan	63
Tabel 4.9 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual	65

Tabel 4.10	Tanggapan Responden Terhadap Variabel Persepsi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dimensi Relevan.....	66
Tabel 4.11	Tanggapan Responden Terhadap Variabel Persepsi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dimensi Andal.....	67
Tabel 4.12	Tanggapan Responden Terhadap Variabel Persepsi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dimensi Dapat Dibandingkan...	68
Tabel 4.13	Tanggapan Responden Terhadap Variabel Persepsi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dimensi Dapat Dipahami.....	70
Tabel 4.14	<i>Outer Loading</i>	73
Tabel 4.15	<i>Cross Loading</i>	75
Tabel 4.16	<i>AVE</i>	76
Tabel 4.17	<i>Latent Variable Correlations</i>	77
Tabel 4.18	<i>Composite Reliability</i> dan <i>Cronbachs Alpha</i>	77
Tabel 4.19	<i>Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values)</i>	79
Tabel 4.20	<i>R Square</i>	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Desain Penelitian.....	41
Gambar 4.1. Model Pengukuran.....	78
Gambar 4.2 Model Struktural.....	81

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembaran Kuisisioner

Lampiran 2. Tabel Hasil Jawaban Kuisisioner

Lampiran 3. Hasil Uji Statistik *PLS Algorithm*

Lampiran 4. Gambar Model Pengukuran Dengan *PLS Algorihtm*

Lampiran 5. Hasil Uji Statistik *Bootstraping*

Lampiran 6. Gambar Model Pengukuran Dengan *Bootsraping*

Lampiran 7. Tabel Distribusi t

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi sektor publik telah terlibat dalam strategi perubahan kelembagaan, organisasi dan manajerial dalam rangka memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat akan akuntabilitas keuangan. Perubahan tersebut menjadikan sistem manajemen sektor publik yang awalnya terkesan birokratis, kaku dan hierarkis menjadi manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi kepentingan publik. Permasalahan mengenai kualitas laporan keuangan kini semakin hangat untuk diperbincangkan, banyaknya kasus - kasus buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia masih menjadi isu hangat yang perlu dikaji lebih dalam. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam penyusunan Laporan Keuangan tersebut.

Laporan keuangan merupakan laporan yang disusun secara sistematis mengenai posisi keuangan suatu entitas pada saat tertentu, dan kinerja suatu entitas pada periode tertentu. Maka untuk memenuhi syarat – syarat dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan yang dapat mengatur dan mengelola penyajian laporan keuangan. Peraturan itu yaitu peraturan pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi penyusun

standar akuntansi pemerintahan pusat dan daerah dalam melaksanakan tugasnya, penyusunan laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar, pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, dan para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (Nugraheni, 2008).

Terkait dengan kualitas laporan keuangan sektor publik yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka yang perlu diperhatikan adalah kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah, serta penerapan SAP yang berlaku. Penerapan terhadap SAP sangat diperlukan agar hasil dari laporan keuangan lebih berkualitas (relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami).

Dalam pengelolaan keuangan pemerintah yang baik, pemerintah harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan, memiliki keahlian dan pengetahuan, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, serta memiliki perilaku yang baik. Hal tersebut diperlukan untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten tersebut akan memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 2008).

Negara kita masih kekurangan SDM yang mengelola keuangan negara khususnya yang berlatarbelakang ilmu akuntansi (Fontanella, 2010). Karena sumber daya manusia merupakan kunci dari keberhasilan suatu instansi atau perusahaan karena sumber daya manusia pada suatu instansi memiliki nilai yang tinggi disebabkan oleh kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan.

Dengan adanya perubahan pada sektor publik tersebut, terjadi pula perubahan pada sistem akuntansi dari akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi berbasis akrual. Perubahan tersebut diperlukan karena sistem akuntansi berbasis kas dianggap saat ini tidak lagi memuaskan, terutama karena kekurangannya dalam menyajikan gambaran keuangan yang akurat dan dalam memberikan informasi manajemen yang berguna dan memadai untuk memfasilitasi perencanaan dan proses kinerja (Cohen *et al.*, 2007).

Adanya penetapan PP No. 71 Tahun 2010 maka penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Hal ini berarti pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan standar akuntansi pemerintahan yang baru yaitu standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang harus dilaksanakan selambat-lambatnya tahun 2015. Namun, dalam implementasinya pengelolaan keuangan negara masih perlu pembenahan dan perbaikan, hal ini dinyatakan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No.81 tahun 2010 tentang *Grand Desain* Reformasi Birokrasi yang menjelaskan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, kualitasnya masih perlu banyak pembenahan dalam penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, dan opini Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) atas Laporan keuangan kementerian atau lembaga masih banyak perlu ditingkatkan menuju opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Berdasarkan data yang dipublikasikan, perkembangan opini yang dilakukan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Opini Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2011-2015

Tabel Rincian Opini atas LKKL dan LKBUN							
No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	002	Dewan Perwakilan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	004	Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	000	Mahkamah Agung	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
5.	006	Kepolisian RI	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP	WDP
6.	007	Sekretariat Negara	WTP	WTP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP
7.	010	Kementerian Dalam Negeri	WTP-DPP	WTP-DPP	WDP	WTP-DPP	WTP
8.	011	Kementerian Luar Negeri	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WDP
9.	012	Kementerian Pertahanan	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP-DPP	WDP
10.	013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	WTP	WTP-DPP	WTP	WTP-DPP	WTP
11.	016	Kementerian Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12.	018	Kementerian Pertanian	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WDP
13.	019	Kementerian Perindustrian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14.	020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP
15.	022	Kementerian Perhubungan	WDP	WDP	WTP	WTP-DPP	WTP
16.	023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	TMP	WDP	WTP	WTP	WTP
17.	024	Kementerian Kesehatan	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
18.	025	Kementerian Agama	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP	WDP
19.	026	Kementerian Ketenagakerjaan	WDP	WDP	WDP	TMP	WDP
20.	027	Kementerian Sosial	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP	WDP	TMP

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa opini LKKL sampai tahun 2015 masih terdapat kementerian dan lembaga yang mendapatkan opini *disclaimer* atau tidak memberikan pendapat (TMP), sedangkan lembaga tinggi negara Mahkamah Agung yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Pada tahun 2006 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini *disclaimer* dikarenakan terdapat ketidakwajaran akun belanja, persediaan dan aset tetap, di

tahun 2007 dan 2008 masih diberikan opini *disclaimer* untuk Mahkamah Agung dikarenakan terdapat pembatasan lingkup audit biaya perkara, dan ketidakwajaran akun belanja, persediaan dan aset tetap, sedangkan di tahun 2009 opini *disclaimer* diberikan BPK karena terdapat ketidakwajaran akun kas, persediaan dan aset tetap dan pada tahun 2010 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan pendapat wajar dengan pengecualian dengan hal yang dikecualikan adalah sejumlah aset tetap hasil inventarisasi dan penilaian tidak dapat divalidasi dan diverifikasi karena berita acara rekonsiliasi hasil Inventarisasi dan Penilaian (IP) disatker tersebut tidak tersedia. Dan baru pada tahun 2012 Mahkamah Agung mendapat opini wajar tanpa pengecualian, hal ini dapat terlaksana karena mahkamah agung, langsung mengidentifikasi beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam mewujudkan opini wajar tanpa pengecualian di tahun berikutnya, yaitu diantaranya menegaskan kembali komitmen pimpinan untuk melakukan penertiban pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilingkungan masing-masing, mengoptimalkan pembinaan teknis SAI yang telah dilaksanakan, terutama pelatihan operator serta meningkatkan koordinasi, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Aset Tetap sesuai Standar Akuntansi Pemerintah, selain itu perlu disusun *standar operating procedure* terhadap pelaksanaan pendistribusian barang hasil pengadaan kantor pusat ke pengadilan dan meningkatkan koordinasi serta pengendalian dan pengawasan terhadap ketertiban pengadministrasian.

Hal-hal yang menjadi acuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Mahkamah Agung (MA) tersebut juga menjadi sebuah teguran yang keras bagi unit kerja pengadilan yang berada dibawahnya, karena unit kerja pengadilan merupakan entitas dari Mahkamah Agung, dimana laporan keuangan Mahkamah Agung (MA) merupakan konsolidasian dari laporan keuangan unit-unit kerja yang ada dibawahnya. Berdasarkan hal tersebut seluruh petugas yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan pengadministrasian diunit kerja dituntut untuk melakukan perbaikan secara berjenjang dengan harapan hal ini akan merubah penyajian laporan keuangan sehingga memenuhi standar karakteristik kualitatif yang sesuai dengan PP nomor 71 tahun 2010.

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan Sudiarianti, Ni Made. (2015) dengan judul penelitian "*Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Pada Penerapan Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.*" Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada penambahan variabel penerapan sistem akuntansi berbasis akrual, ditambahkan menjadi variabel karena peneliti terinspirasi dari penelitian McDaniel et al. (2002) yang menyatakan bahwa kualitas pelaporan keuangan harus menghasilkan informasi yang lengkap, transparan dan bermanfaat bagi penggunaanya, hal ini sesuai dengan prinsip akuntansi berbasis akrual ,serta letak lokasi penelitian yang berbeda.

Berdasarkan uraian latar belakang, penulis berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut tentang pelaporan keuangan dalam tesis dengan judul: “ Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Berbasis AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan ” (Studi Kasus Pada Unit Kerja Mahkamah Agung Wilayah Lampung)

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan penulis, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada unit satuan kerja Mahkamah Agung wilayah lampung?
2. Apakah sistem akuntansi pemerintah keuangan berbasis akrual berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada unit satuan kerja Mahkamah Agung wilayah lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada unit satuan kerja Mahkamah Agung wilayah lampung.
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem akuntansi pemerintah keuangan berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pada unit satuan kerja Mahkamah Agung wilayah lampung.

1.4. Manfaat Teoritis Penelitian

1. Bagi literatur tentang akuntansi

Pengetahuan dan wawasan mengenai pengelolaan keuangan berbasis akrual dan faktor - faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada unit satuan kerja lembaga pengadilan wilayah lampung.

2. Bagi Pemerintah

Bahan masukan kepada pemerintah dalam mengambil kebijaksanaan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas laporannya di masa yang akan datang.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk pengembangan serta menjadi sumber informasi atau masukan bagi peneliti selanjutnya dalam bidang yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Landasan Teori menjabarkan teori-teori yang relevan dan mendukung penelitian ini, mulai dari teori *New Public Management*, *Teori Kontinjensi*, dan Teori Keagenan. Juga penjelasan mengenai perkembangan akuntansi akrual pada pemerintah Indonesia. Teori-teori tersebut inilah yang akan mendukung perumusan hipotesis dan kerangka pemikiran.

2.1.1. Teori New Public Management (NPM)

Pada tahun 1980-an terjadi fenomena perubahan gaya manajemen di sektor publik. Fenomena perubahan ini populer disebut *New Public Management*. Perubahan ini terjadi karena adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah yang dianggap tidak efisien dan efektif dalam pengelolaan sumber daya. Ketidakpuasan ini dipicu oleh keadaan utang pemerintah yang terus meningkat dan turunnya pertumbuhan ekonomi. Dalam banyak kasus pemerintah diminta untuk mereview perannya dalam kegiatan dan operasi, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara.

Watkins dan Edward (2007), menjelaskan adopsi gaya manajemen sektor privat ke sektor publik. Mendorong pemerintah menggunakan akuntansi berbasis akrual, karena publik juga membutuhkan informasi yang transparan, akuntabilitas, dan penilaian kinerja dalam sistem *New Public Management*. Dalam pemilihan basis akuntansi, akuntansi kas masih mendominasi di seluruh dunia, akan tetapi tren yang terjadi adalah perubahan secara bertahap dari akuntansi kas menuju akuntansi akrual. *International Federation of Accountants*, merekomendasikan akuntansi berbasis akrual akan mendorong transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan sektor publik.

Penggunaan akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu ciri dari praktik manajemen keuangan sektor yang modern, yang bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya (*cost*) pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan didalam pemerintah dengan menggunakan informasi yang detail, yang tidak sekedar basis kas. Secara umum, akuntansi akrual diterapkan dengan tujuan untuk meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah terhadap seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung pengambilan keputusan secara efektif dan efisien.

Menurut Pollitt (2002) adopsi inovasi NPM dapat dikategorikan pada empat tahap yang berbeda: (1) pengungkapan, (2) Keputusan, (3) praktik, dan (4) dampak dari perubahan. Penelitian ini berfokus pada tahap praktik di mana NPM secara teknis digunakan oleh organisasi sektor publik, termasuk faktor-faktor kontekstual dan organisasi yang dapat mempengaruhi penggunaan teknik-teknik baru dalam praktik.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan membandingkan secara obyektif dan implementasi aktual dari sistem akuntansi akrual pada pemerintah Indonesia dengan mengukur sejauh mana penerapan akuntansi akrual berbagai faktor yang berpotensi berpengaruh pada tingkat kualitas laporan keuangan.

2.1.2. Teori *Kontinjensi*

Pendekatan Kontinjensi *Teori kontinjensi* muncul sebagai bagian yang sangat mendasar karena berbagai studi dilakukan untuk mencari sifat *kontinjensi* dalam akuntansi (Parkinson, 2012). dan Gerdin dan Greve (2008) berpendapat bahwa pendekatan kontinjensi dapat dilakukan jika memenuhi asumsi yang menjadi ide dari pendekatan *kontinjensi* sebagai berikut:

- (a) Tidak ada satupun desain organisasional yang terbaik, yang terstruktur secara pasti dan tidak terstruktur secara pasti, yang diaplikasikan dalam suatu organisasi.
- (b) Beragam desain organisasional tersebut memiliki peluang hasil atau kinerja yang sama. Terpenuhinya kedua asumsi tersebut merupakan syarat untuk dapat dilakukannya pengujian kontinjensi dalam bentuk seleksi natural yaitu dengan menyesuaikan perubahan jumlah populasi (Gerdin dan Greve, 2008).

Pendekatan kontijensi dalam penelitian ini akan digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara kompetensi SDM dengan kualitas laporan keuangan. Berdasarkan pendekatan diatas, ada dugaan bahwa adanya hubungan antara kompetensi SDM dengan kualitas laporan keuangan

2.1.3. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan pada dasarnya merupakan teori yang muncul karena adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Teori ini mengasumsikan bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen (Jensen dan Meckling, 1976). Teori keagenan akan terjadi pada berbagai organisasi termasuk dalam organisasi pemerintahan dan berfokus pada persoalan ketimpangan/asimetri informasi antara pengelola (agen/pemerintah) dan publik (diwakili prinsipal/ dewan). Prinsipal harus memonitor kerja agen, agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien serta tercapainya akuntabilitas publik Lane (2000), dan Mardiasmo (2007) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*prinsipal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu: (a) pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal), dan (b) pertanggungjawaban kepada masyarakat luas

(akuntabilitas horizontal). Praktek pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan. Pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik serta baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya (Irwan, 2011).

Penggunaan basis akuntansi akrual diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari agen kepada prinsipal. Dan dalam penelitian ini, satuan kerja merupakan agen yang mendapat mandat untuk menyampaikan laporan keuangan. Juga sesuai dengan amanat undang-undang bahwa laporan keuangan tersebut harus disusun berdasarkan basis akrual. Tingkat penerapan akuntansi akrual pada satuan kerja dapat menjadi salah satu tolok ukur dari pertanggungjawaban satuan kerja sebagai agen kepada masyarakat sebagai prinsipal.

2.1.4. Kualitas Laporan Keuangan

Dalam memenuhi keinginan pemakaian laporan, akuntansi keuangan perlu berupaya untuk membentuk dirinya agar lebih bermanfaat dan berdaya guna. Oleh karena itu, perlu kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dianggap dapat memenuhi keinginan tersebut yaitu keinginan para pemakai laporan keuangan (Harahap, 2008).

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah ukuran - ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi. Ke-4 (empat) karakteristik ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki :

1. **Relevan**

Informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur berikut :

a. Manfaat umpan balik (*feedback value*).

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b. Manfaat prediktif (*predictive value*).

Informasi dapat memprediksi masa yang akan datang.

c. Tepat waktu (*timeliness*).

Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi informasi yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut:

a. Penyajian jujur.

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat diverifikasi (*verifiability*).

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas.

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat Dipahami

Informasi harus dapat dipahami oleh pemakainya, dan dinyatakan dalam bentuk dan dengan istilah yang disesuaikan dengan batas pengertian para pemakai. Dalam hal ini, dari pihak pemakai juga diharapkan adanya pengertian/pengetahuan mengenai aktivitas-aktivitas ekonomi perusahaan, proses akuntansi keuangan, serta istilah-istilah teknis yang digunakan dalam laporan keuangan.

4. Dapat Dibandingkan

Pengukuran tidak dapat sepenuhnya lepas dari pertimbangan-pertimbangan dan pendapatan yang subyektif. Hal ini berhubungan dengan keterlibatan manusia di dalam proses pengukuran dan penyajian informasi, sehingga informasi tersebut tidak lagi berlandaskan pada realita obyektif semata. Dengan demikian untuk meningkatkan manfaatnya, informasi harus dapat diuji kebenarannya oleh para pengukur yang independen dengan menggunakan metode pengukuran yang sama.

Penjelasan dalam pengembangan kerangka konseptual FASB juga memperhatikan tujuan laporan keuangan dengan karakteristik-karakteristik kualitas dari informasi yang dilaporkan dalam Concept Statement kedua atau SFAC 2 meliputi relevansi (*predictive value*, *feedback value*, dan *timeliness*), reliabilitas (*variability* dan *representational faithfulness*) dengan penjelasan sebagai berikut :

1. FASB mendefinisikan relevansi sebagai : kapasitas informasi untuk membuat sebuah perbedaan dalam sebuah keputusan yang membantu user membuat prediksi tentang outcome/hasil dari transaksi/peristiwa masa lalu, sekarang, dan yang akan datang atau untuk menjelaskan atau mengoreksi prediksi sebelumnya.
2. Kualitas utama dari informasi yang lain yang membuat informasi bermanfaat untuk pembuatan keputusan adalah reliabilitas, dan reliabilitas ini terdiri dari dua unsur, yaitu verifikasiabilitas (kemampuan untuk membuktikan/verifikasi) dan representasi keakuratan. FASB mendefinisikan verifikasiabilitas sebagai kemampuan untuk menjamin bahwa informasi merepresentasikan isi dari informasi atau metode pengukuran yang dipilih dan yang digunakan tanpa ada kesalahan atau bias.

Definisi kualitas informasi tersebut dapat dijadikan dasar bahwa sebuah informasi dikatakan berkualitas jika informasi yang dihasilkan memiliki karakteristik: relevan, akurat, tepat waktu, ringkas, jelas, dapat diukur dan konsisten. Lebih lanjut Wilkinson (2000:35) menyatakan bahwa kualitas informasi yang dihasilkan dari sebuah sistem informasi sangat tergantung pada *resources inputs* berupa: *Manpower, Material, Facilities, Funds dan Data*.

Menurut Wang (1998) dalam penelitiannya yang berjudul *A product perspective on data quality management*, menjelaskan dimensi kualitas informasi terdiri atas *free of error, objectivity, reputation, believability, relevancy, value added, timeliness, completeness, a ppropriate amount of information, interpretability, understandability, consistent representation, concise representation, ease of manipulation, accessibility, dan security.*

Sedangkan Hiro Tugiman (1996) dalam bukunya *Audit Sistem Informasi*, menyatakan bahwa kualitas informasi tergantung dari tiga hal yaitu akurat, tepat waktu, dan relevan dan untuk menjamin kualitas informasi maka dibutuhkan pengendalian internal yang memadai yang meliputi: organisasi, pemisahan fungsi, kepegawaian, pengendalian operasi, keamanan fisik dan logis, *environmental control*, pemulihan masalah, pengembangan dan pemeliharaan sistem, pengendalian perangkat keras, asuransi, siklus hidup pengembangan sistem.

Sedangkan Hall (2009) dalam bukunya yang berjudul *Accounting Information System* menyatakan bahwa informasi yang berguna memiliki karakteristik berikut ini :

1. Relevan yaitu isi dari suatu laporan atau dokumen harus bekerja untuk suatu tujuan.
2. Tepat waktu yaitu informasi harus tidak melebihi periode waktu dari tindakan yang didukungnya.
3. Akurasi yaitu informasi harus bebas dari kesalahan yang signifikan

4. Kelengkapan yaitu semua informasi yang penting bagi sebuah keputusan atau pekerjaan harus ada.
5. Ringkas yaitu informasi harus dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Selanjutnya Jogiyanto (2005) mengatakan bahwa agar dapat berguna maka informasi harus didukung oleh tiga pilar yaitu tepat kepada orangnya atau relevan (*relevance*), tepat waktu (*timeliness*) dan tepat nilainya atau akurat (*accurate*), jika keluaran tidak didukung oleh ketiga pilar ini tidak dapat dikatakan sebagai informasi yang berguna.

Karena peneliti mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No.71 tahun 2010 tentang *Grand Desain* Reformasi Birokrasi yang menjelaskan bahwa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Selain itu unsur karakteristik kualitatif suatu laporan keuangan yang dijelaskan dalam Standar Akuntansi Pemerintah telah mencakup semua aspek yang dijelaskan oleh sumber lain. Maka unsur kualitas informasi laporan keuangan dalam SAP ini menjadi bentuk yang paling sempurna untuk dijadikan dasar penelitian.

2.1.5. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi bukanlah konsep yang baru. Nyoman Rudana (2006) mendefinisikan : “Kompetensi (*competency*) sebagai karakteristik yang mendasar yang dimiliki seseorang yang berpengaruh langsung terhadap, atau dapat memprediksikan, kinerja yang sangat baik. ”

Kompetensi menurut S.K. Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 43 Tahun 2001 Tentang Standar Kompetensi PNS adalah kemampuan dan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa latar belakang pendidikan, pengetahuan, keahlian, dan sikap perilaku dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Kompetensi tersebut dibagi menjadi dua yaitu :

1) Kompetensi Umum

Adalah kemampuan dan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan struktural yang dipangkunya. Kompetensi umum dapat diperoleh melalui pendidikan formal maupun diklat kepemimpinan.

2) Kompetensi Khusus

Adalah kemampuan dan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil berupa keahlian untuk melaksanakan tugas jabatan struktural yang dipangkunya. Kompetensi khusus dapat diperoleh melalui diklat teknis.

Berdasarkan S.K. Kepala BKN No. 43 Tahun 2001 Tentang Standar Kompetensi Pegawai dapat disimpulkan bahwa ada empat komponen utama pembentukan kompetensi, yaitu:

1. Latar Belakang Pendidikan

Pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991), pendidikan diartikan sebagai proses pembelajaran bagi individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai objek-objek tertentu dan spesifik. Istilah pendidikan digunakan untuk menyadarkan pemakai informasi tentang informasi yang dapat dihasilkan oleh sistem dan berbagai persyaratan yang ditetapkan oleh pemakai yang dapat dipenuhi oleh sistem akuntansi yang dirancang. Dimana pendidikan merupakan tahap implementasi yang dilakukan perusahaan untuk membuat sistem informasi yang telah dirancang menjadi dapat dilaksanakan secara operasional (Mulyadi, 2001). Sedangkan menurut Meuthia dan Endrawati (2008) mengemukakan bahwa dimilikinya pendidikan formal yang memadai dengan latar belakang akuntansi untuk staf bagian akuntansi akan memudahkan staf dalam menjalani pekerjaannya. Staf akuntansi yang memiliki pendidikan yang relevan dengan pekerjaannya kan memiliki kemampuan yang tercemin dari hasil pekerjaannya.

2. Pengetahuan

Adalah informasi yang dimiliki seorang pegawai untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai bidang yang digelutinya. Ilmu atau informasi yang dimiliki seseorang pegawai dapat digunakan dalam kondisi nyata dalam suatu pekerjaan. Pengetahuan pegawai turut menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, pegawai yang mempunyai pengetahuan yang cukup meningkatkan efisiensi.

3. Keterampilan

Merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan perusahaan kepada seseorang pegawai dengan baik dan maksimal, misalnya keterampilan bekerja sama dengan memahami dan memotivasi orang lain, baik secara individu atau kelompok. Keterampilan ini sangat diperlukan bagi pegawai yang sudah menduduki jabatan tertentu, karena keterampilan ini dalam berkomunikasi, memotivasi, dan mendelegasi. Selain pengetahuan dan keterampilan pegawai, hal yang perlu diperhatikan adalah sikap perilaku pegawai.

4. Sikap

Merupakan pola tingkah seseorang pegawai didalam peran melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan. Apabila pegawai mempunyai sifat mendukung pencapaian organisasi, maka secara otomatis segala tugas yang dibebankan kepadanya akan dilaksanakan sebaik - baiknya.

Sumber Daya Manusia adalah satu kesatuan tenaga manusia yang dalam organisasi dan bukan hanya sekedar penjumlahan karyawan - karyawan yang ada. Sebagai kesatuan, sumber daya manusia harus dipandang sebagai suatu sistem di mana tiap - tiap karyawan berfungsi untuk mencapai tujuan organisasi. (Matindas, 2013: 89).

Warisono (2008) mengungkapkan bahwa Pemerintah harus memiliki sumber daya yang kompeten, yang di dukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta sikap yang baik dalam pengelolaan keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik.

2.1.6. Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual

Reformasi akuntansi pemerintahan mendapat momentumnya dengan terbitnya UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mewajibkan adanya suatu Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai basis penyusunan laporan keuangan instansi pemerintah, lalu diperkuat dengan UU 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-undang tersebut menyebabkan kebutuhan mendesak akan standar akuntansi sebagai basis penyusunan dan audit laporan keuangan instansi pemerintah oleh BPK. Tanpa standar, BPK tidak dapat menerbitkan opini audit. Bentuk pertanggungjawaban APBN/APBD adalah laporan keuangan yang harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Penyusunan PSAP dilandasi oleh Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, yang merupakan konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP Berbasis Akruwal terdapat pada Lampiran I Peraturan Pemerintah tersebut dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas, yaitu mulai akhir tahun 2010.

Selain mengubah basis SAP dari kas menuju akruwal menjadi akruwal, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tersebut mendelegasikan perubahan terhadap PSAP diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Perubahan terhadap PSAP tersebut dapat dilakukan sesuai dengan dinamika pengelolaan keuangan negara. Meskipun demikian, penyiapan pernyataan SAP oleh KSAP tetap harus melalui proses baku penyusunan SAP dan mendapat pertimbangan dari BPK.

Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, laporan keuangan yang harus disajikan oleh pemerintah daerah selambat - lambatnya tahun anggaran 2014 adalah sebagai berikut :

1. Pelaporan Pelaksanaan Anggaran (budget report)

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur – unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari :

1. Pendapatan - LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
2. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
3. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana pertimbangan dan dana bagi hasil.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2. Pelaporan Financial (*financial report*)

a. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari :

4. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber - sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan

budaya. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset di diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

5. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulansetelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
6. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

b. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung terdiri dari :

7. Pendapatan - LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.
8. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
9. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
10. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

d. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing - masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

11. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah.

12. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.

3. Catatan atas laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas.

Menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa terdapat pengakuan unsur laporan keuangan dalam akuntansi, yaitu proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan- LO, dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan

entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos - pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu entitas kejadian atau peristiwa untuk diakui, yaitu:

- a. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan.
- b. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas, yaitu :

- a. Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi

Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan.

b. Keandalan Pengukuran

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan keuangan (CaLK).

c. Pengakuan Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah

dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar di muka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

d. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Sejalan dengan penerapan basis akrual, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

e. Pengakuan Pendapatan

Pendapatan - LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan.

f. Pengakuan Beban dan Belanja

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Perbedaan mendasar SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI dengan SAP Berbasis AkruaI terletak pada PSAP 12 mengenai Laporan Operasional. Entitas melaporkan secara transparan besarnya sumber daya ekonomi yang didapatkan, dan besarnya beban yang ditanggung untuk menjalankan kegiatan pemerintahan. Surplus/defisit operasional merupakan penambah atau pengurang ekuitas/kekayaan bersih entitas pemerintahan bersangkutan.

2.2 Pengembangan Hipotesis

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini diantaranya adalah digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Review Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Fariziah Choirunisah (2008)	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Yang Dihasilkan Sistem Akuntansi Instansi (Studi pada Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Malang tahun 2008)	Variabel dependen: Kualitas Informasi Laporan Keuangan Variabel Independen: Kemampuan SDM, Dukungan Pimpinan & Alat, Fasilitas, Organisasi Tim, Sistem Pengendalian	Faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap relevansi informasi sebagai indikator kualitas informasi adalah faktor kemampuan sumber daya manusia dan pengorganisasian tim SAI.
2	Jayant V. Saraph, P. George Benson & Roger G.Schroeder (1991)	<i>The effects of Organizational Context on Quality Management : An Empirical Investigation</i>	Variabel dependen <i>Quality management (product/service design, training, employee relations, and top management leadership)</i> Variabel independen <i>Organizational context (internal factors: corporate support for quality, past quality performance, management knowledge.</i>	Organizational quality context yang berupa dukungan perusahaan, kualitas kinerja dimasa lalu, pengetahuan manajerial dan pengembangan kualitas permintaan berpengaruh terhadap kualitas manajemen

			<i>External factors.)</i>	
3	Xu Hongjilang, et al. 2003.	<i>Key Issues of Accounting Information Quality Management: Australian Case Studies. Industrial Management & Data System. 103 (7): 461-470.</i>	Variabel dependen: Kualitas Informasi sistem akuntansi Implikasinya terhadap keandalan system. Variabel independen Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Faktor eksternal	Hasil penelitiannya menyatakan sumber daya manusia, sistem, organisasi, dan faktor eksternal merupakan faktor kritis menentukan kualitas informasi akuntansi. Keandalan sistem harus didukung oleh keandalan SDM dan harus dikontrol agar dapat berjalan dengan baik.
4	Nugrahen, Purwaniati dan Subaweh, Imam, 2008	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Variabel dependen: Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional Variabel independen Penerapan SAP di Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional, Pengetahuan Pengelola UAPPA EI dan UAPPB, dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana	1. Pimpinan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional perlu memperkuat sistem pengendalian internal, guna meningkatkan opini yang diberikan oleh BPK-RI dari pernyataan tidak memberikan pendapat menjadi wajar tanpa pengecualian. 2. Pimpinan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional perlu mengimplementasikan SAP dalam penyusunan laporan keuangan serta

				<p>terus melakukan penelaahan dan mengusulkan hasil penelaahan tersebut kepada Komite SAP (KSAP) dalam rangka perbaikan SAP.</p> <p>3. Pimpinan Inspektorat Jenderal agar melaksanakan sosialisasi SAK dan SABMN secara menyeluruh, melaksanakan bimbingan teknis, sehingga terjadi peningkatan pengetahuan pengelola UAPPA E1 dan UAPPB.</p> <p>.</p>
5	Ni Made Sudiarianti (2015)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan DAN Standar Akuntansi Pemerintah, serta Implikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan Daerah.	<p>Variabel dependen</p> <p>Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p>Variabel independen</p> <p>Kompetensi sumber daya manusia (SDM) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi SDM, penerapan SPIP dan SAP memiliki pengaruh positif pada kualitas laporan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.</p>
6	Indriasari, Desi 2014.	<i>The Effect of Government Apparatus Competence and the</i>	<p>Variabel dependen</p> <p>Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p>Variabel independen</p>	<p>Hasil pengujian hipotesis memberikan bukti empiris sebagai berikut. Kapasitas</p>

		<i>Effectiveness of Government Internal Control Toward the Quality of Financial Reporting in Local Government''.</i>	Kapasitas Sumber Daya Manusia, dan Pengendalian Intern Akuntansi	sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.
--	--	--	--	---

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan Sudiarianti, Ni Made. (2015) dengan judul penelitian "*Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah, serta Implikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan Daerah.*" Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada penambahan variabel penerapan sistem akuntansi berbasis akrual, ditambahkan menjadi variabel karena peneliti terinspirasi dari penelitian McDaniel et al. (2002) yang menyatakan bahwa kualitas pelaporan keuangan harus menghasilkan informasi yang lengkap, transparan dan bermanfaat bagi penggunaannya, hal ini sesuai dengan prinsip akuntansi berbasis akrual, serta letak lokasi penelitian yang berbeda.

Berdasarkan uraian latar belakang, penulis berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut tentang pelaporan keuangan yang didasarkan pada Sistem Akuntansi Keuangan Berbasis Akrual dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, sekaligus menuangkannya dalam tesis dengan judul: "*Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*" (Studi Kasus Pada Unit Kerja Mahkamah Agung Wilayah Lampung).

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas

Laporan Keuangan

Pendekatan kontijensi dalam penelitian ini akan digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara kompetensi SDM dengan kualitas laporan keuangan. Berdasarkan pendekatan diatas, ada dugaan bahwa adanya hubungan antara kompetensi SDM dengan kualitas laporan keuangan

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ada ketidakkonsistenan antara antara satu peneliti dengan peneliti lainnya, sehingga disimpulkan bahwa terdapat variabel lain yang memengaruhinya. Perbedaan hasil temuan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pendekatan kontijensi (Govindarajan, 1988).

Warisono (2008) mengungkapkan bahwa Pemerintah harus memiliki sumber daya yang kompeten, yang di dukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta sikap yang baik dalam pengelolaan keuangan. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik.

Abdul Halim (2012) mengatakan dibutuhkan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan profesional dalam pengelolaan keuangan. Penyiapan dan penyusunan laporan keuangan tersebut memerlukan SDM yang menguasai laporan keuangan.

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa Sumber daya yang kompeten adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat melakukan sebuah tugas dengan kinerja yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Sehingga dalam hal ini yang menjadi indikator untuk mengukur kompetensi sumber daya manusia, yaitu Latar Belakang Pendidikan, Pengetahuan, Keterampilan, dan Sikap. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

2.2.1. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis AkruaI terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hipotesis ini dipengaruhi oleh 2 teori, yaitu : *New Public Management*, dan Keagenan. Menurut teori *New Public Management*. Perubahan terjadi karena adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah yang dianggap tidak efisien dan efektif dalam pengelolaan sumber daya. Ketidakpuasan ini dipicu oleh keadaan utang pemerintah yang terus meningkat dan turunnya pertumbuhan ekonomi. Dalam banyak kasus pemerintah diminta untuk mereview perannya dalam kegiatan dan operasi, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara.

Watkins dan Edward (2007), menjelaskan adopsi gaya manajemen sektor privat ke sektor publik. Mendorong pemerintah menggunakan akuntansi berbasis akrual, karena publik juga membutuhkan informasi yang transparan, akuntabilitas, dan penilaian kinerja dalam sistem *New Public Management*. Dalam pemilihan basis akuntansi, akuntansi kas masih mendominasi di seluruh dunia, akan tetapi tren yang terjadi adalah perubahan secara bertahap dari akuntansi kas menuju akuntansi akrual. *International Federation of Accountants* merekomendasikan akuntansi akrual akan mendorong transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan sektor publik, Menurut Pollitt (2002) adopsi inovasi NPM dapat dikategorikan pada empat tahap yang berbeda: (1) pengungkapan, (2) Keputusan, (3) praktik, dan (4) dampak dari perubahan. Penelitian ini berfokus pada tahap praktik di mana inovasi NPM secara teknis digunakan oleh organisasi sektor publik, termasuk faktor-faktor kontekstual dan organisasi yang dapat mempengaruhi penggunaan teknik-teknik baru dalam praktik. Sedangkan menurut teori keagenan merupakan teori yang muncul karena adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen.

Teori keagenan akan terjadi pada berbagai organisasi termasuk dalam organisasi pemerintahan dan berfokus pada persoalan ketimpangan/asimetri informasi antara pengelola (agen/pemerintah) dan publik (diwakili prinsipal/dewan). *Prinsipal* harus memonitor kerja agen, agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien serta tercapainya akuntabilitas publik (Lane, 2000). Mardiasmo (2007) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan

pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*prinsipal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tsb.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan membandingkan secara obyektif dan implementasi aktual dari sistem akuntansi akrual pada pemerintah Indonesia dengan mengukur sejauh mana penerapan akuntansi akrual berbagai faktor yang berpotensi berpengaruh pada tingkat kualitas laporan keuangan.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi merupakan berbagai catatan transaksi yang digunakan untuk keperluan penyusunan laporan keuangan dalam rangka memenuhi tujuan pengelolaan manajemen.

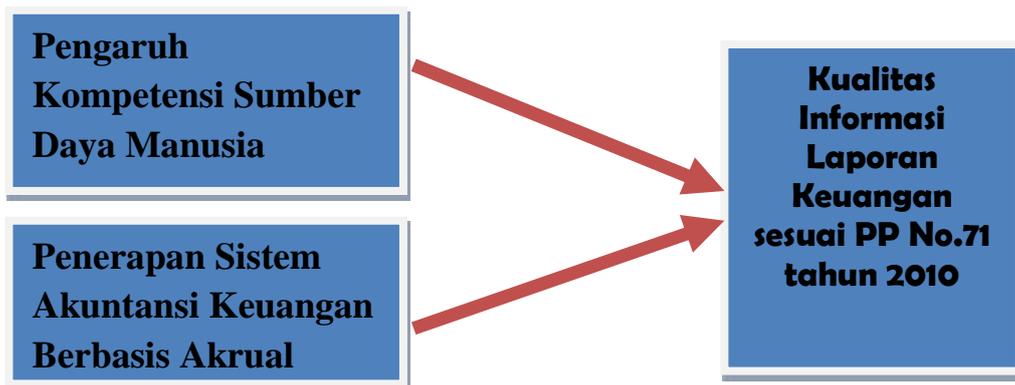
H2 : Sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

2.4 Desain Penelitian

Berdasarkan pengembangan hipotesis di atas maka terbentuklah desain penelitian yang menggambarkan pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Berbasis AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan, sebagai berikut :

Gambar 2.2

Desain Penelitian



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dilakukan melalui prosedur pengumpulan data penelitian lapangan (*field research*) (Cialdini, 2011; Mack, 2005; Trochim, 1999). Data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari kuisisioner yang disebar pada sampel yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung (Iqbal, 2004; Nazir, 2005; Husein, 2008).

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh unit kerja Mahkamah Agung yang ada di wilayah Lampung.

Responden dipilih dengan menggunakan teknik *purposive judgment sampling* dimana sampel dipilih dari elemen populasi yang memenuhi kriteria tertentu untuk menjadi sampel (Kerlinger, 1986). Responden dalam penelitian ini adalah operator SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akruar) dan operator SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) pada 22 Unit Kerja Mahkamah Agung Wilayah Lampung.

Tabel 3.1. Data Sampel Penelitian

No	Unit Kerja	Operator SAIBA	Operator SIMAK	Jumlah
1	Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	1	1	2
2	Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung	1	1	2
3	Pengadilan Tata Usaha Negara	1	1	2
4	Pengadilan Negeri Tanjung Karang	1	1	2
5	Pengadilan Negeri Metro	1	1	2
6	Pengadilan Negeri Sukadana	1	1	2
7	Pengadilan Negeri Gunung Sugih	1	1	2
8	Pengadilan Negeri Kota Agung	1	1	2
9	Pengadilan Negeri Kalianda	1	1	2
10	Pengadilan Negeri Liwa	1	1	2
11	Pengadilan Negeri Kotabumi	1	1	2
12	Pengadilan Negeri Belambangan Umpu	1	1	2
13	Pengadilan Negeri Menggala	1	1	2
14	Pengadilan Agama Tanjung Karang,	1	1	2
15	Pengadilan Agama Metro,	1	1	2
16	Pengadilan Agama Gunung Sugih,	1	1	2
17	Pengadilan Agama Kalianda,	1	1	2
18	Pengadilan Agama Tanggamus,	1	1	2
19	Pengadilan Agama Kotabumi,	1	1	2
20	Pengadilan Agama Tulang Bawang,	1	1	2
21	Pengadilan Agama Krui,	1	1	2
22	Pengadilan Agama Belambangan Umpu	1	1	2
	Jumlah	22	22	44

3.3. Definisi Operasional Variabel

Tabel 3.2. Definisi Operasional Variabel

Variabel Dependen	Dimensi	Indikator	NO Kuisisioner
Persepsi Kualitas Laporan Keuangan (PP no 71 tahun 2010) dan (Harahap, Sofyan Syafri. 2008)	Relevan	1. Lengkap 2. Feedback Value 3. Predictive Value 4. Timeliness	Bagian A No 1-5
	Andal	1. Penyajian jujur 2. Dapat diverifikasi 3. Bersifat Netral	Bagian A No 6-10
	Dapat dibandingkan	1. Informasi Keuangan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya 2. Penyusunan Laporan Keuangan sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintah	Bagian A No 11-13
	Dapat dipahami	1. Informasi Laporan Keuangan disusun dengan jelas. 2. Informasi Laporan Keuangan disajikan Sesuai dengan batas pemahaman pengguna. 3. Laporan Keuangan disusun secara sistematis sehingga mudah dimengerti.	Bagian A No 14-16
Variabel Independen	Dimensi	Indikator	
Kompetensi Sumber Daya Manusia (SK BKN No 43 Tahun 2001) dan (Matindas, R. 2013)	Pengetahuan (Knowledge)	1. Meningkatkan efisiensi pekerjaan. 2. Memiliki tanggung jawa pekerjaannya	Bagian B No 1-6
	Keahlian (Skill)	1. Memahami pekerjaannya dengan baik. 2. Membuat laporan keuangan dengan baik.	Bagian B No 7-13

	Perilaku (Attitude)	1. Bertanggung Jaab 2. Memaham etika dan kode etik pekerjaannya. 3. Tidak mudah diintervensi atasan.	Bagian B No 14-16
	Latar Belakang Pendidikan	1. Dapat memberikan instruksi pekerjaan dengan jelas	Bagian B No 17-20
Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual (PP no 71 tahun 2010) dan (Watkins, A. Edward, C. 2007)	Transparan	Laporan keuangan lebih detail bagi para pemangku kepentingan	Bagian C No 1,2,3,4
	Akuntabilitas	Laporan keuangan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	Bagian C No 5,8,10,11
	Penilaian Kinerja	Laporan keuangan yang dihasilkan dapat membantu pemerintah untuk mengevaluasi kinerja.	Bagian C No 6,7,9,12

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas informasi laporan keuangan yang terdiri dari empat dimensi yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Variabel ini dikembangkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Sedangkan variabel independennya terdiri dari Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual.

Konstruk-konstruk tersebut dijelaskan ke dalam beberapa indikator (lihat tabel 3.2) dan masing-masing indikator tersebut merupakan bentuk pertanyaan yang disebar kepada para responden. Setiap pertanyaan diberikan pilihan jawaban dengan skor 1 sampai 5 dimana 1 = sangat setuju, 2 = setuju, 3 = netral, 4 = tidak setuju, 5 = sangat tidak setuju.

Kuisisioner yang telah dibentuk disebar kepada penyusun laporan keuangan yaitu operator SAIBA dan operator SIMAK-BMN pada masing-masing unit kerja lembaga pengadilan di wilayah Lampung, sehingga total responden yang menilai adalah sebanyak 44 responden.

3.4 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Dalam menganalisis dan manginterpretasikan data kuisisioner yang telah dikumpulkan, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis inferensial. Metode analisis deskriptif dilakukan melalui statistik deskriptif, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan konsep secara lebih rinci dan menjelaskan pula apakah konsep yang diukur berada dalam kondisi yang siap untuk dianalisis lebih lanjut. (Umar, 2008; Sugiyono, 2009; Simamora, 2002). Selain itu, penelitian deskriptif didefinisikan sebagai penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independent*) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

Tujuan dari penelitian deskripsi adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Sugiyono, 2009).

Analisis deskriptif dilakukan dengan menyusun tabel frekuensi distribusi untuk mengetahui apakah tingkat perolehan nilai (skor) variabel penelitian masuk dalam kategori: sangat baik, baik, cukup, tidak baik, sangat tidak baik. Untuk itu dibuat kriteria pengklasifikasian dimana Rentang Skor (RS) diperoleh dengan rumusan sebagai berikut:

$$RS = \frac{n(m-1)}{r},$$

Dimana:

n : jumlah populasi (dalam penelitian ini 44)
m : jumlah alternative jawaban tiap item (5 alternatif)
(Umar, 2008; Sugiyono, 2009; Simamora, 2002)

Setelah rentang skor diperoleh selanjutnya data dianalisis untuk menggali dan mengetahui skor nilai setiap variabel, data dikumpulkan menggunakan instrumen kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai indikator-indikator yang ingin diukur. Indikator-indikator tersebut merupakan tanggapan responden yang dinilai dengan cara memberi skor untuk tiap jawaban dengan berpedoman pada skala Likert dan menggunakan skala ordinal (Umar, 2008; Sugiyono, 2009; Simamora, 2002).

3.4.2 Model Analisis

Model analisis yang digunakan adalah pemodelan persamaan struktural (*Structural Equation Modeling*) yang berbasis komponen atau varian (*component based*) yaitu *Partial Least Square* (PLS) yang dikembangkan oleh Herman Wold (1975); Joreskog dan Sorbom (1989); Hagedoorn dan Schakenraad (1994) dalam Hulland (1999). Teknik *Partial Least Squares* (PLS) dipilih karena perangkat ini banyak digunakan untuk menaksir model *path* dengan *sample size* yang kecil (Chin 1999), kemudian digunakan untuk model yang sangat kompleks (terdiri dari banyak variabel laten dan manifes) tanpa mengalami masalah dalam estimasi data (Wold, 1985), selain itu PLS merupakan metodologi yang lebih menguntungkan dari CBSEM ketika ketidaksesuaian atau hasil *non-convergen* muncul (Heywood et al, 1998), PLS juga dapat digunakan ketika distribusi data sangat miring (Bagozzi, 1994), dan PLS dapat digunakan ketika independensi antara data pengamatan tidak dapat dijamin sebab menurut Fornell (1982), tidak ada asumsi distribusi yang dibutuhkan.

Karena jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini termasuk kecil (44 sampel) maka digunakan PLS sebagai alat analisisnya. Untuk melakukan pengujian dengan SEM berbasis komponen atau PLS, digunakan bantuan program *SmartPLS* versi 2.0. PLS yang mengenal dua macam komponen pada model kausal yaitu: model pengukuran (*measurement model*) dan model struktural (*structural model*). Model struktural terdiri dari konstruk-konstruk laten yang tidak dapat diobservasi, sedangkan model pengukuran terdiri dari indikator-indikator yang dapat diobservasi. Pada pengujian ini juga dilakukan estimasi

koefisien-koefisien jalur yang mengidentifikasi kekuatan dari hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Model pengukuran terdiri dari hubungan antara item-item variabel dapat diobservasi dan konstruk laten yang diukur dengan item-item tersebut (Hulland, 1999). Untuk melakukan analisis dengan PLS (*Partial Least Square*) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1.4.2.1 Menyusun Konstruksi Diagram Jalur

Penelitian ini dilakukan untuk menguji secara empiris pengaruh dukungan atasan, pelatihan, dan kejelasan tujuan terhadap persepsi kualitas informasi laporan keuangan.

3.4.2.2. Konversi Diagram Jalur ke Persamaan

Berdasarkan model diagram jalur yang digambarkan diatas maka persamaan *inner model* dinyatakan sebagai berikut :

$$\mathbf{LK} = \mathbf{1DA} + \mathbf{1}$$

$$\mathbf{LK} = \mathbf{2PL} + \mathbf{2}$$

Keterangan :

LK = Variabel endogen

DA, PL, KT = Variabel eksogen

₁₋₂ = Gama (kecil), koefisien pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen

ζ_{1-2} = Zeta, error model

3.4.2.3. Pendugaan Parameter

3.4.2.3.1 Menilai *Outer Model* Atau *Measurement Model*.

Model pengukuran adalah penilaian terhadap reliabilitas dan validitas variable penelitian atau didefinisikan sebagai hubungan antara indikator dengan variabel laten, terdapat tiga kriteria untuk menilai model pengukuran yaitu: *convergent validity*, *discriminant validity* dan *composite reliability* (Bagozzi, 1994).

- a. *Convergent validity* dari model pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara *item score/component score* dengan *construct score* yang dihitung dan ukuran *refleksif individual* tersebut dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang ingin diukur (Chin, 1998). Namun secara umum nilai faktor loading di atas 0.50 juga dianggap dapat mewakili tingkat validitas suatu indikator dengan variabel latennya (Hulland, 1999).
- b. *Discriminant validity* dari model pengukuran dengan indikator refleksif dinilai berdasarkan *cross loading* pengukuran dengan konstruk. Jika korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya, maka menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksi ukuran pada blok mereka lebih baik daripada ukuran pada blok lainnya (Hulland, 1999). Fornell dan Larcker mengatakan bahwa metode lain untuk mengukur *discriminant validity* adalah membandingkan nilai akar kuadrat dari *average variance extracted* (AVE) setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model. Jika nilai akar kuadrat AVE setiap konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model,

maka dikatakan memiliki nilai *discriminant validity* yang baik. Berikut rumus untuk menghitung AVE oleh *Fornell dan Larcker (1981)* :

$$AVE = \frac{\sum \lambda_i^2}{\sum \lambda_i^2 + \sum \text{var}(v_i)}$$

Dimana λ_i adalah *component loading* ke indikator dan $\text{var}(v_i) = 1 - \lambda_i^2$. Jika semua indikator di *standardized*, maka ukuran ini sama dengan *average communalities* dalam blok. Mengutip *Fornell dan Larcker* , merekomendasikan nilai AVE harus lebih besar 0.50.

- c. *Composite reliability* blok indikator yang mengukur suatu konstruk dapat dievaluasi dengan dua macam ukuran yaitu *composite reliability* dan *cronbach's alpha* dengan menggunakan output yang dihasilkan oleh PLS, *composite reliability* dapat dihitung dengan rumus yang dikembangkan oleh *Fornell dan Larcker (1981)* sebagai berikut:

$$...c = \frac{(\sum \lambda_i)^2}{(\sum \lambda_i)^2 + \sum \text{var}(v_i)}$$

Dimana λ_i adalah *component loading* ke indikator dan $\text{var}(v_i) = 1 - \lambda_i^2$. Model c sebagai ukuran *internal consistency* hanya dapat digunakan untuk konstruk indikator refleksif. Suatu variabel laten memiliki reliabilitas yang tinggi apabila nilai *composite reliability* dan atau *cronbach's alpha* di atas 0,70 (*Nunnally dan Bernstein, 1994; Chin, 1998; Hartmann, 2008*).

3.4.2.3.2 Menilai *inner model* atau *structural model*

Pengujian *inner model* atau model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk, yang dilihat dari nilai *R-square* dari model penelitian dan juga dengan melihat besar koefisien jalur strukturalnya (Birkinshaw, 1995; Cool 1989; Fornell, 1990; Hulland, 1999). Stabilitas dari estimasi ini dievaluasi dengan menggunakan uji t statistik yang diperoleh lewat prosedur *bootstrapping*.

Pengujian hipotesis yang dilakukan secara parsial dengan uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan signifikansi dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan uji-t pada tingkat keyakinan 95% dengan rumus (R.A Fisher dalam Gujarati, 2010) :

$$t = \frac{\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Kriteria pengujian :

- Jika t statistik > t tabel, maka nyata, dengan kata lain menerima Hipotesis.
- Jika t statistik < t tabel, maka tidak nyata, dengan kata lain menolak Hipotesis
- Taraf Signifikansi t tabel pada df = 42 dan Pr = 0,05 adalah sebesar 2,021

Berdasarkan uraian di atas, berikut ini merupakan kriteria penilaian model *Partial Least Square* (PLS) yang diajukan Chin (1998) :

Tabel 3.3
Kriteria Penilaian PLS

KRITERIA	PENJELASAN
<p>Evaluasi Model Pengukuran <i>(Measurement Model/Outer Model)</i></p> <p><i>Convergent validity</i></p> <p><i>Discriminant validity</i></p> <p><i>Composite reliability</i></p>	<p>Nilai korelasi <i>item score</i> dengan <i>construct score</i> harus di atas 0.50</p> <p><i>Cross loading</i>, diharapkan setiap blok indikator memiliki loading yang lebih tinggi untuk setiap variabel laten yang diukur dibandingkan dengan indikator untuk variabel laten lainnya.</p> <p>AVE (<i>average variance extracted</i>) nilainya harus di atas 0.50 dan diharapkan nilai kuadrat dari AVE harus lebih besar daripada nilai korelasi antar variabel laten.</p> <p>Diukur dengan <i>composite reliability</i> dan <i>cronbach's alpha</i> dan nilainya harus diatas 0.70</p>
<p>Evaluasi Model Struktural <i>(Structural Model/Inner Model)</i></p> <p><i>R Square</i></p> <p>Estimasi koefisien jalur</p>	<p>Hasil <i>R square</i> untuk variabel laten endogen dalam model struktural mengindikasikan bahwa model baik, moderat, dan lemah.</p> <p>Nilai estimasi untuk hubungan jalur dalam model struktural menilai signifikansi. Nilai signifikansi diperoleh dengan metode <i>bootstrapping</i> dengan melihat nilai t statistik. Jika t statistik > t tabel maka Hipotesis diterima</p>

Sumber : Ghozali (2008)

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Tujuan penelitian ini menunjukkan bahwa secara empiris kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Hasil ini dapat diartikan pula untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah cenderung dibutuhkan kompetensi SDM yang baik pula. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki, maka ada kecenderungan semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah. Sedangkan variabel penerapan standar akuntansi keuangan berbasis akrual (PSABA) berpengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, Dengan adanya pelaporan berbasis akrual, pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya. Akuntansi pemerintah berbasis akrual juga memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumber daya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumber daya tersebut, karena publik juga membutuhkan informasi yang transparan, akuntabilitas, dan penilaian kinerja dalam penyampaian laporan keuangan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu :

1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel unit kerja pengadilan pada titik waktu tertentu yaitu pada saat dilakukan survey, sehingga kemungkinan data yang didapat kurang relevan.
2. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pengumpulan data melalui kuisisioner yang langsung dibagikan dan didampingi peneliti dalam proses pengisian kuisisioner tersebut, sehingga ada kemungkinan data menjadi bias karena pengisian jawaban yang kurang mencerminkan maksud dan keinginan responden untuk masing-masing pertanyaan yang ada.
3. Terdapat beberapa indikator pertanyaan dalam variabel persepsi kualitas informasi laporan keuangan yang belum mencerminkan pengimplementasian sesungguhnya pada unit kerja.
4. Karena keterbatasan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan dalam setiap unit kerja, memungkinkan pengisian kuisisioner pada bagian faktor pelatihan menjadi tidak representatif.

5.3 Saran

1. Sebaiknya Unit Kerja Mahkamah Agung di wilayah Lampung memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Instrumen atau item yang digunakan dapat dijadikan dasar sebagai penjabar masing-masing dimensi sehingga dapat dijadikan indikator dalam membuat kebijakan mengenai peningkatan kualitas laporan keuangan unit kerja.
 - b. Sebaiknya unit kerja dapat memperhatikan pengadaan pelatihan bagi para operator SAIBA dan SIMAK dilingkungan unit kerja, diharapkan bahwa yang mengikuti pelatihan memang petugas yang memiliki latar belakang akuntansi, selain itu perlu diambil kebijakan bahwa operator yang bersangkutan harus memegang tupoksi yang sama minimal satu periode laporan keuangan, sehingga tidak terjadi penggantian dipertengahan periode yang menyebabkan ketidakpahaman pada operator yang baru.
2. Sebaiknya pada saat penyebaran kuisioner kepada responden peneliti memberikan waktu yang lebih banyak dan tidak mendampingi responden selama pengisian jawaban, hal ini dilakukan agar hasil penelitian tidak bias.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan sampel dan lokasi yang berbeda agar hasil penelitian dapat dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, selain itu diharapkan juga penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel yang lebih besar sehingga dapat memberikan hasil dan gambaran penelitian yang lebih baik dan dapat digeneralisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim & Syam Kusufi. 2012 . *Akuntansi Sektor Publik : teori, konsep dan aplikasi*. Salemba Empat : Jakarta.
- Alam, S. 2013 . *Akuntansi SMA untuk Kelas XI*. Jakarta: Erlangga.
- Alimbudiono, R.S dan Fidelis, A.A. 2004 . “Kesiapan Sumber Daya Manusia Sub Bagian Akuntansi Pemerintah Daerah “XYZ” dan Kaitannya Dengan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kepada Masyarakat: Renungan Bagi Akuntan Pendidik”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*. Vol. 05 No. 02: Hal.18–30.
- Bastian, Indra. 2007. *Sistem Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Benson, P. George; Saraph, Jayant V.; Schroeder, Roger G. 1991 . *The Effects of Organizational Context on Quality Management: An Empirical Investigation*. *Management Science* Vol. 37 No. 9 pp. 1107.
- BKN. Surat Keputusan Kepala BKN Nomor 43 Tahun 2001 Tentang Standar Kompetensi Jabatan.
- Choirunisah, Fariziah. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Yang Dihasilkan Sistem Akuntansi Instansi*. *Jurnal Akuntansi*. Vol:3, Hal 79-92. Juli 2008 UGM, Yogyakarta.
- Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. 2007. *Research Methods in Education (6th ed)*. New York: Routledge.
- Fontanella, Amy. 2010. *Analisis Pengaruh Latar Belakang Pendidikan dan Pengetahuan Akuntansi Pengguna Terhadap Pemanfaatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Vol.5, No.2, Desember 2010, 22-30.
- Gerdin, J. dan Greve, J. 2008. *The appropriateness of statistical methods for testing contingency hypotheses in management accounting research*. *Journal Accounting, Organizations and Society* 33. 995-1009.
- Ghozali, Imam. 2008. *Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Govindarajan, V. 1988. *A Contingency Approach to Strategy Implementation at the Business - Unit Level : Integrating Administrative Mechanisms with Strategy*. *Academy of Management Journal*, 3.
- Hall, James A. 2009. *Accounting Information System 4th Edition*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta. Hal 19-20.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2008. *Teori Akuntansi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Hartmann, Frank and Sergeja Slapnicar. 2008. *How Formal Performance Evaluation Affects Trust Between Superior And Subordinate Managers*. Accounting, Organizations, and Society. 34 (2009) 722-737.
- Hood, C.1991. “ *a Public Management For All Seasons?*” Public Administrations, 69: 3-19.
- Hutapea, Parulian dan Nurianna Thoha. 2008. *Kompetensi Plus*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hulland, John. 1999. *Use Of Partial Least Squares (PLS) In Strategic Management Research: A Review Of Four Recent Studies*. Strategic Management Journal, Vol.20, No.2, pp.195-204.
- Indriasari, D. dan Nahartyo, E. 2008. *Pengaruh kapasitas sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (studi pada pemerintah kota Palembang dan kabupaten ogan ilir)*. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi Vol. 2. No. 2 Juli 2009 Hal. 133-151
- Indriasih, D. 2014. *The Effect of Government Apparatus Competence and the Effectiveness of Government Internal Control Toward the Quality of Financial Reporting in Local Government*. Research Journal of Finance and Accounting. Vol.5, No.20 ISSN 2222-2847.
- Irwan, D. 2011. “*Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat*”. Jurnal Fokus Bisnis, Volume 14, No 02, bulan Desember 2011.
- Jensen C.M. dan Meckling H.W. 1976. Theory of the firm : *Manajerial behavior agency costs and ownership structure*. Journal of Financial Economic.
- Jogiyanto. 2005. *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Lane, J.E. 2000. *The Public Sector – Concepts, Models and Approaches*. London: SAGE Publications
- McDaniel, L., R.D. Martin, and L.A. Maines. 2002. Evaluating Financial Reporting Quality: The Effects of Financial Nurul Mutmainnah dan Ratna Wardhani, Analisis Dampak Kualitas Komite Audit..... 170 Expertise vs Financial Literacy. The Accounting Review, Supplement: Quality of Earnings Conference, 77, 139-167
- Mardiasmo, 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi.
- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol. 2 No. 1, Hal. 1-17.
- Matindas, R. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Lewat Konsep Ambisi, Kenyataan dan Usaha*. Jakarta : Edisi II, Grafiti.

- Meuthia Reno Fithri, Endrawati. 2008. *Pengaruh Faktor Pendidikan, Pelatihan, Pengalaman Kerja dan Penguasaan Komputer Staf Bagian Akuntansi terhadap Kualitas Penyajian Informasi Akuntansi. (Studi Pada Kantor Cabang Bank Nagari)*. Jurnal Akuntansi dan Manajemen Vol 3 No. 1 Juni 2008 ISSN: 1858: 3687.
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat. Jakarta.
- Nazir, Moh.2005. *Metode Penelitian*. Penerbit Ghalia Indonesia. Bogor.
- Nugraheni, Purwaniati dan Subaweh, Imam, 2008. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan", Jurnal Ekonomi Bisnis, No. 1 Vol. 13, April 2008, hal 48-58
- Parkinson, J. 2012. Accounting for Process Cost System in New Zealand. *The Journal of Law and Financial Manajement*. Vol 11 Issue 2.
- Pollitt, Christopher, dan Geert Bouckaert .2000. *Public Management Reform: A Comparative Analysis*, Oxford. Oxford University Press.
- Romney, Paul John, Stainbart, 2004. *Information System Account*. Prentiss Hall Salemba Empat, Jakarta.
- Simamora, Bilson. 2002. *Panduan Riset Perilaku Konsumen*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Sudiarianti, Ni Made (2015). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi, Vol. 3, No. 4.,2015.
- Sugiyanto, 2013. *Pengaruh Human Capital, Motivasi dan Dukungan Atasan Terhadap Kesuksesan Karir Karyawan : Studi Empiris Di PT.Asian Cotton Bandung*. Jurnal Akuntansi Manajemen Bisnis dan Sektor Publik (JAMBSP). Volume 3 Nomor 3 – Juni 2007: 333-348.
- Suhardjo, Y. dan Adhi, D.K. 2013. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tual). Jurnal Akuntansi, Vol 5, No 3, ISSN : 2252-7826.
- Sukmaningrum, Tantriani; Puji Harto. 2012. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang)", Jurnal Ekonomika dan Bisnis. Vol. 9, No.1, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2013. *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrua*l. Cetakan Kedua. Alfabeta, Bandung.
- Tugiman, Hiro. 1996. *Pengantar Audit Sistem Informasi*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

- Tuckman, B.W. 1988. *Conducting Education Research*. New York : Harcourt Brace Jovanovich
- Umar, Husein, Dr. 2008. *Desain Penelitian Akuntansi Keperilakuan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Wang, R.Y. 1998. *A Product Perspective On Total Data Quality Management*. Communications of the ACM, Vol. 41 No. 2, pp. 58-65.
- Warisno. 2008. *Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah*. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi, Hal: 206-220, Vol. 3, No. 2
- Warren, S.C., Reeve, M.J., dan Fess, E.P. 2005. *Corporate Financial Accounting*. South Western: Thomson.
- Watkins, A. Edward, C. 2007. "Accounting, New Public Management and American Politics: Theoretical Insights into the National Performance Review", Critical Perspectives on Accounting journal, Volume 18 hal 33– 58.
- Wilkinson, W. Joseph, Michael J. Cerullo, Vasant Raval & Bernard Wong-OnWing. 2000. *Accounting Information Systems: Essential Concepts and Applications*. Fourth Edition. John Wiley and Sons. Inc.
- Xu, H., Jeretta, H.N., Daryl, G.N. dan Lin, B. 2003. Key Issues of Accounting Information Quality Management: Australian Case Studies, (<http://www.Emeradinsight.com>) [11/09/2014] Yamin, Sofyan dan Heri Kurniawan. 2011. *Partial Least Square Path Modeling*. Penerbit Salemba Infotek. Jakarta.
- Zeyn, E., 2011. Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi. Jurnal Review Akuntansi dan Keuangan. Vol.1, No. 1. Hal: 21-37
- 2003, Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 2004, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- 2005, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas.
- 2010, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.